MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal A. Yani Kav.58 (Lt. 9 – 10) By Pass Jakarta 10510 PO BOX 1148
Telepon: (021) 29079177 (Hunting) Fax (021) 3505193
Laman: *https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id*

SURAT TUGAS

Nomor : 48 /DjMT/Ratgas/KP.01.3/II/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas dan meningkatkan jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu melaksanakan kegiatan pendampingan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 34/DjMT/KEP/OT.01/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Penetapan Tim Implementasi dan Pendampingan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : Theo Afianto, S.T.
NIP : 199612112020121005
Pangkat : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Untuk :
1. Melaksanakan kegiatan Pendampingan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang pada tanggal 8 sd. 10 Maret 2023;
2. Segala biaya dibebankan pada DIPA Ditjen Badilmiltun Nomor SP DIPA-005.05.1.663122/2023 Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 November 2022;
3. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2023

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,

Lulik Tri Cahyaningrum